

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat krusial. Berbagai macam teori maupun kebijakan ekonomi di terapkan dalam rangka mencapai dan mengusahakan tujuan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup. Secara ekonomi kesejahteraan hidup suatu negara biasa diukur melalui instrument pertumbuhan ekonomi/PDB (*growth*), pendapatan per kapita (*per capita income*) dan indeks pembangunan manusia (*human development index*) Lugastoro dan Ananda (2013).

Konsep *IPM* pertama kali dipublikasikan UNDP (*United Nations Development Programme*) melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam misi Presiden yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Berdasarkan spending review APBD tidak terlepas dari desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik.

Lugastoro dan Ananda (2013) telah meneliti untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan sebagai variabel utama dirasiokan dengan belanja modal. Hal ini berarti menunjukkan kemampuan PAD dan dana perimbangan dalam membiayai belanja modal daerah.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 25 kabupaten dan kota se Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM). Dan hasil pengujian Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diprosikan dengan

Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ardiansyah dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dikategorikan cukup berhasil dalam menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah nya dengan disertai penggunaan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk belanja modal. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dalam mencapai kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Implikasi penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal dalam upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seyogyanya sudah menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai itu.

Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi Pembangunan Manusia telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu Lugastoro dan Ananda (2013), Setyowati dan Suparwati (2012), Ardiansyah dkk (2014). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) ,Pertumbuhan Ekonomi, Pengalokasian Belanja Modal sebagai variabel intervening. Peneliti tidak menggunakan variabel Dana Bagi Hasil , Pertumbuhan Ekonomi , Pengalokasian

Belanja Modal sebagai variabel intervening dikarenakan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil tidak konsisten .

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / kota di Jawa Tengah.”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan belanja modal serta mengetahui peningkatan kualitas pembangunan manusia.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Bab ini berisi tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data secara terperinci.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya